

IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Studi Pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara)

Mas Nurul Wahdhani¹, Fajar Apriani², Cathas Teguh Prakoso³

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam implementasi program keaksaraan fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Informan lainnya ialah KASI kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan PNFI, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu, Kepala Lembaga PKBM Ceria, Tutor (Guru Pembimbing) dan juga Warga Belajar. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman. Temuan dalam implementasi program keaksaraan fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dari segi komunikasi dan struktur birokrasi serta koordinasi antara pelaksana dan warga belajar juga sudah berjalan. Dari segi sumberdaya manusia sudah baik dan mumpuni, tetapi untuk sumberdaya anggaran masih belum mencukupi untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan program keaksaraan fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga kurangnya sumberdaya fasilitas terkait Program Keaksaraan Fungsional ini. Dari segi disposisi dan struktur birokrasi pun sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kendala. Untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini adalah faktor ekonomi, fasilitas pendukung dan keaktifan peserta program keaksaraan fungsional.

Kata Kunci : Implementasi Program, Keaksaraan Fungsional

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: masdhanibontang@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun ajaran 2011/2012 program Keaksaraan Fungsional ini menghasilkan 22 lulusan dan 2 siswa tidak lulus, tetapi pada tahun ajaran 2012/2013 program Keaksaraan Fungsional ini tidak berjalan karena tidak adanya peserta di Desa Makarti tersebut, ini menunjukkan bahwa masih kurangnya komunikasi antara atasan dengan agen pelaksana (top-down) masih kurang baik, khususnya dalam hal sosialisasi program tersebut. Hal ini membuat jumlah penderita buta aksara makin meningkat setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel diatas. Jumlah penderita buta aksara yang makin banyak tidak diikuti dengan jumlah kelulusan yang semakin baik. Lalu program Keaksaraan Fungsional ini kembali digulirkan pada tahun ajaran 2013/2014 dan hanya mampu menjaring 18 peserta dan meluluskan 14 orang, padahal masih banyak warga Desa Makarti yang membutuhkan pendidikan keaksaraan. Pada tahun ajaran 2014/2015 program Keaksaraan Fungsional ini tidak terlaksana dan program tersebut dilaksanakan lagi pada tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017 kesertaan pada dua tahun ajaran ini jumlah peserta menjadi meningkat, tetapi hal ini tidak diikuti dengan jumlah kelulusan yang semakin baik pula. Hal ini merupakan suatu masalah dalam pengimplementasian program tersebut.

Dari data diatas, dapat dilihat dari tahun ajaran 2011/2012 sampai tahun ajaran 2016/2017 tingkat kelulusan warga peserta Program Keaksaraan Fungsional ini masih belum konsisten dan belum ada yang mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun target dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu mencapai hasil maksimal dalam tiap tahun ajaran program Keaksaraan Fungsional ini dijalankan yaitu 100% peserta program Keaksaraan fungsional lulus. Jika hal ini masih belum bisa diterapkan maka hal itu akan menghambat rancangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu bebas buta aksara pada 2020.

Dalam hal ini membuktikan bahwa pada pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional ini masih terdapat banyak masalah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara)”.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program keaksaraan fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara ?

2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi program keaksaraan fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara ?

KERANGKA DASAR TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dye (dalam Agustino, 2016:15) mendefinisikan kebijakan publik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (what difference it makes). Jenkins (dalam Agustino, 2016:17) memandang kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berhubungan, dalam kata lain kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komperhensif menyertakan banyak stakeholders.

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris, yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster (dalam Anggara, 2014:232) to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Menurut Meter dan Horn (dalam Anggara, 2014:232) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan Meter dan Horn (dalam Agustino, 2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pemberantasan Buta Aksara Melalui Program Keaksaraan Fungsional

Kartakusuma (2003:215) mengatakan istilah lain untuk menyebut aksara adalah huruf atau abjad (bahasa arab) yang dimengerti sebagai lambang bunyi (fonem) sedangkan bunyi itu sendiri adalah lambing pengertian yang menurut catatan sejarah secara garis besar terdiri dari kategori:

1. Piktografik antara lain aksara hieroglif Mesir, Tiongkok purba;
2. Ideografik antara lain aksara Tiongkok massa kemudian yang hasil goresannya tidak lagi dilihat melukiskan benda konkrit;
3. Silabik antara lain menggambarkan suku-suku kata seperti Nampak pada aksara Dewenagari (Prenagari), Pallawa jawa, arab, Katakana dan Hiragana Jepang.

Program keaksaraan fungsional merupakan perwujudan dari suatu kebijakan sosial dalam bentuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan. Menurut Bessant, Watss, Dalton dan Smith (dalam Suharto, 2011:10-11), sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Menurut Midgley (dalam Suharto, 2011:11) dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Dari ketiga kategori tersebut, program Keaksaraan Fungsional termasuk program pelayanan sosial.

Keaksaraan fungsional (functional literacy) secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Namun menurut Napitupulu dalam Kusnadi (2005:77) keaksaraan didefinisikan secara luas sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh semua di dalam dunia yang berubah cepat, merupakan hak asasi manusia. Lebih lanjut dikatakan bahwa, di dalam setiap masyarakat, keaksaraan merupakan keterampilan yang diperlukan pada dirinya dan salah satu pondasi bagi keterampilan-keterampilan yang lain.

Definisi Konsepsional

Implementasi Program Keaksaraan Fungsional adalah serangkaian kebijakan/program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang diterapkan ke daerah-daerah termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka memberantas buta aksara yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu dalam menangani masalah buta aksara yang ada di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang bersifat deskriptif. Tujuan utama penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji, rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mendahulukan proses interaksi dan komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan, untuk menjawab tujuan dari penelitian mengenai Implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara), maka ditentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keaksaraan Fungsional :
 - a) Komunikasi
 - b) Sumber Daya
 - c) Disposisi
 - d) Struktur Birokrasi
2. Faktor penghambat dalam proses Implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b) Informan lain dan diharapkan membantu memberikan informasi tambahan dalam penelitian ini, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu, Ketua Lembaga PKBM Ceria Kecamatan Marangkayu, Kepala Sub Bagian pada dinas terkait dan warga desa yang mengikuti program keaksaraan fungsional tersebut.
2. Data sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks, baik pada instansi maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Berikut adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yaitu sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data (Data Collection)
- b) Kondensasi data (Data Condensation)
- c) Penyajian Data (Data Display)
- d) Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions)

Dengan demikian jelaslah bahwa data kualitatif merupakan analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data atau penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Program Keaksaraan Fungsional

Desa Makarti merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Marangkayu yang dimana masih banyak warganya yang mengalami masalah keaksaraan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakan program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu. Dalam hal ini UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu sebagai pelaksana untuk menjalankan program ini bekerjasama dengan Lembaga PKBM Ceria untuk melaksanakannya.

Implementasi Program Keaksaraan Fungsional

Pada implementasi program keaksaraan fungsional ini peneliti menggunakan teori Edward III sebagai fokus penelitian yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan komunikasi pada implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara) diantaranya yaitu :

- a) Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyampaikan program keaksaraan fungsional adalah dengan menggunakan presentasi langsung (tatap muka) dan mengundang seluruh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan menyampaikan secara langsung tentang program keaksaraan fungsional ini secara rinci.

- b) Komunikasi mengenai program keaksaraan fungsional melalui proses panjang dalam penyampaian. Pertama Kepala Dinas Pendidikan Kartanegara memberikan tanggungjawab kepada Bidang PAUD dan PNFI untuk menyampaikan program ini kepada setiap Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan termasuk Marangkayu, lalu Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu bekerjasama lagi dengan Lembaga PKBM Ceria yang dimana Lembaga ini yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan dan menjalankan program ini di lapangan, dan untuk penyampaian program ini di lapangan pihak Lembaga PKBM ini kembali mempercayakan kepada pihak tutor (guru pembimbing) untuk menyampaikannya kepada para warga.

b) Sumber Daya

Kesimpulan tentang sumberdaya pada implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara) diantaranya yaitu :

- a) Sumber daya manusia yang memadai sebagai implementator pada program keaksaraan fungsional ini. Dari hasil penelitian diatas terlihat bahwa dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini terdapat sumberdaya manusia yang sebenarnya cukup memadai untuk menjalankan program keaksaraan fungsional ini. Ditambah lagi setiap sumber daya manusia yang ada telah mengetahui dengan adanya program ini.
- b) Pendanaan dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini berasal dari APBN dan APBD yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan ke daerah yaitu Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c) Dukungan tenaga pengajar (tutor/guru pembimbing) pada pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini hanya terdiri dari dua orang dari empat tenaga pengajar (tutor/guru pembimbing) yang diperlukan dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional.
- d) Fasilitas belajar yang digunakan untuk melaksanakan program keaksaraan fungsional ini adalah dengan meminjam gedung sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran program keaksaraan fungsional ini.

c) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh penulis, diperoleh informasi bahwa komitmen dari para pelaksana dalam melaksanakan Program Keaksaraan Fungsional di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan/program dan di dukung oleh kelompok sasaran implementasi yaitu

peserta Program Keaksaraan Fungsional yang di lakukan di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

d) Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian mengenai struktur birokrasi diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara) terdapat beberapa poin penting diantaranya yaitu :

- a) Dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini terdapat bidang khusus dalam pelaksanaannya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu bidang PAUD dan PNFI. Bidang tersebut bertugas untuk melaksanakan program keaksaraan fungsional ini secara penuh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu bidang PAUD dan PNFI juga memiliki tugas penting untuk memberitahukan tentang adanya program keaksaraan fungsional ini kepada setiap Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.
- b) Pelaksanaan program keaksaraan fungsional yang dilakukan di daerah diatur oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan yang bekerjasama dengan Lembaga PKBM Ceria untuk menjalankan program keaksaraan fungsional ini berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu bertindak sebagai pengawas dan perlindungan program.
- c) SOP dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini dibuat oleh bidang PAUD dan PNFI yang tetap dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d) Program keaksaraan fungsional ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui bidang PAUD dan PNFI kemudian untuk pelaksanaan di daerah dilakukan oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marangkayu yang bekerjasama dengan Lembaga PKBM Ceria sebagai pelaksana lapangan yang juga turut bekerjasama dengan tenaga pengajar di daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini.

Faktor Penghambat Implementasi Program Keaksaraan Fungsional

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diatas ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Diantaranya yaitu :

- a) Faktor pendapatan warga dan Sumber dana
- b) Fasilitas pendukung yang masih kurang
- c) Faktor keaktifan para peserta program yang masih kurang

Pembahasan

Implementasi Program Keaksaraan Fungsional

Komunikasi yang dilaksanakan dalam implemetasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara belum terlaksana dengan baik dan masih diperlukan lagi komunikasi yang harus dilakukan antar agen pelaksana (implementator kebijakan) di pusat dan di daerah agar tidak terjadi miskomunikasi yang tidak diinginkan. Hal ini bertujuan agar para implementator di lapangan dan kelompok sasaran lebih mengetahui tentang Program Keaksaraan Fungsional ini dan ikut mendukung untuk membuat program ini menjadi berhasil, khususnya di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber daya dalam implementasi program keaksaraan fungsional di Desa Makarti ini masih belum cukup baik. Terlihat dari masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki skill atau kemampuan mengajar di lapangan pada program ini. selain itu faktor pendanaan yang sangat minim juga menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup berpengaruh, karena dengan dana yang terbatas tentu segala keperluan yang dibutuhkan untuk menjalankan program keaksaraan fungsional ini pun menjadi terbatas. Selanjutnya adalah fasilitas pendukung yang tersedia dalam pelaksanaan program ini masih belum cukup memadai, dimana dalam hal ini pihak pelaksana di lapangan masih belum memiliki rumble belajar sendiri.

Disposisi atau sikap pelaksana dalam Implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dilaksanakan dengan cukup baik, adanya dukungan dari para implementator pelaksana dan kelompok sasaran yaitu para warga peserta program keaksaraan fungsional di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan membantu jalannya program ini menjadi lebih baik dan lebih maksimal, tetapi karena masih adanya sikap pegawai yang kurang berkomitmen di dalam program keaksaraan fungsional ini maka hal ini bisa menjadi salah satu penghambat di dalam pelaksanaannya.

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini Struktur birokrasi merupakan salah satu fokus penelitian yang digunakan untuk menganalisis Implementasi Program Keaksaraan Fungsional pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi penghambat dalam struktur birokrasi adalah masih kurang lengkapnya SOP yang dibuat sehingga membuat pelaksanaan program keaksaraan fungsional menjadi terhambat.

Faktor Penghambat Implementasi Program Keaksaraan Fungsional

Dalam implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, seperti :

- 1) Faktor Pendapatan warga dan sumber dana, Keadaan pendapatan warga yang tidak stabil dapat mempengaruhi jalannya program keaksaraan fungsional ini, keadaan pendapatan warga yang kurang baik ini juga disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor keadaan alam karena sebagian besar warga disini bekerja sebagai petani. Selain itu sumberdaya dana dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini diperoleh melalui APBN dan APBD. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terbukti bahwa sumber dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional di Desa Makarti ini masih tidak maksimal bahkan kurang. Selain itu faktor pendapatan warga juga menjadi salah satu faktor penting karena dapat mempengaruhi kondisi masyarakat yang akan menerima program. Apabila keadaan pendapatan warga pada daerah penerima program masih kurang baik maka akan sangat berpengaruh kepada kondisi masyarakatnya. Hal ini dapat membuat pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini menjadi sulit untuk dilaksanakan.
- 2) Fasilitas pendukung yang masih kurang, keadaan fasilitas pendukung yang masih kurang untuk melaksanakan program keaksaraan fungsional ini merupakan faktor penghambat yang sangat pelik, karena dengan kurangnya fasilitas yang dapat digunakan bagaimana sebuah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tentulah menjadi faktor penghambat yang sangat mengganggu dalam sebuah pelaksanaan program. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2016:136) fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untu melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- 3) Faktor keaktifan para peserta program yang masih kurang, Keaktifan para peserta program keaksaraan fungsional masih kurang maksimal, hal ini dipengaruhi oleh keadaan masyarakat di Desa Makarti, dimana sebagian besar warganya masih belum terbuka untuk menerima program ini. Kebanyakan dari mereka beranggapan lebih baik mencari uang untuk kehidupan sehari-harinya dibandingkan harus mengikuti program keaksaraan fungsional yang dinilai tidak menghasilkan apa-apa. Padahal dari data yang telah diperoleh penulis bahwa masih cukup banyak warga Desa Makarti yang membutuhkan adanya program ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Keaksaraan Fungsional Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Dari segi komunikasi, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai implementasi Program Keaksaraan Fungsional kepada para pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, tetapi untuk pelaksanaan di daerah khususnya di Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih belum adanya warga yang mengetahui program ini secara langsung tanpa melalui tutor (guru pembimbing) yang mendatangi rumah mereka, selain itu masih terjadinya miskomunikasi yang terjadi antar para implementator program/kebijakan.
 - b) Dari segi sumberdaya, pegawai dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang memadai khususnya di Desa Makarti. Pihak pengajar yang bertugas untuk melaksanakan program ini jumlahnya sangat terbatas sehingga menghambat jalannya Program Keaksaraan Fungsional ini. Namun faktor sumberdaya dana yang minim menjadi faktor penghambat untuk pelaksanaan program ini khususnya di daerah Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c) Dari segi disposisi (komitmen/sikap Pelaksana), diketahui bahwa disposisi atau komitmen implementator dan kelompok sasaran dalam Implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan cukup baik. Para implementator kebijakan memiliki komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan program keaksaraan fungsional ini. Namun ada beberapa sikap para implementator yang tidak berkomitmen penuh di dalam program keaksaraan fungsional ini dengan berbagai alasan, bahkan mereka tidak berusaha menanyakan tentang ada tidaknya program ini dan bersikap seperti tidak tahu menahu saja. Tetapi pihak pelaksana sudah menyiapkan tindakan pembinaan apabila terdapat masalah yang berkepanjangan mengenai disposisi (sikap pelaksana).

- d) Dari segi struktur birokrasi, Implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat dikatakan cukup baik, karena di dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah di lapangan yang tidak tertera di dalam SOP untuk mengatasinya. Selain itu masih kurangnya koordinasi yang baik dalam struktur birokrasi daerah juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini. Namun untuk pembagian program dari pusat sampai ke daerah sudah dilakukan dengan baik.
2. Faktor penghambat Implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :
 - a) Faktor Pendapatan Warga dan Sumber Dana
 - b) Fasilitas pendukung yang masih kurang
 - c) Faktor keaktifan para peserta program yang masih kurang

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai pelengkap penelitian Implementasi Program Keaksaraan Fungsional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :

1. Pemakaian dana seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena keadaan sumber dana yang terbatas sehingga mengharuskan para pelaksana menekan pemakaian dana seminimal mungkin.
2. Pengadaan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan program keaksaraan fungsional. Diketahui bahwa sumber dana yang ada masih sangat kurang untuk melaksanakan program ini. Tetapi diketahui pula bahwa fasilitas pendukung yang digunakan untuk melaksanakan program ini juga sangat penting, untuk itu dana yang ada cukup di gunakan untuk membeli fasilitas pendukung yang benar benar dibutuhkan saja dalam pelaksanaan program ini.
3. Melakukan musyawarah dengan para peserta program keaksaraan fungsional untuk menentukan waktu yang tepat bagi semuanya agar dapat mengikuti program keaksaraan fungsional tanpa terbentur dengan waktu bekerja. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat sebagian warga peserta program di Desa Makarti bekerja sebagai petani dimana mereka akan bekerja setiap harinya dan akan sangat sulit mencari waktu luang mereka. Untuk itu diperlukannya musyawarah untuk menentukan waktu yang dapat disepakati bersama sebagai waktu untuk melaksanakan program keaksaraan fungsional ini. Karena salah satu faktor keberhasilan dari

program keaksaraan fungsional ini dipengaruhi oleh tingkat keaktifan para peserta program keaksaraan fungsional ini.

4. Perlunya pelatihan atau bimbingan teknik kepada para pelaksana di lapangan khususnya kepada para pengajar di desa Makarti agar dapat menambah sumberdaya manusia yang mampu menjadi tutor/guru pembimbing untuk membantu pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini. Hal ini sangatlah penting karena jumlah tenaga pengajar yang mampu untuk menjadi tutor (guru pembimbing) masih kurang jumlahnya, dimana dalam pelaksanaannya di butuhkan empat tenaga pengajar namun hanya terdapat dua tenaga pengajar yang mampu menjadi tutor (guru pembimbing) dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini
5. Perlunya sosialisai ulang kepada para pegawai tentang Program Keaksaraan Fungsional ini agar semua pegawai mengetahui program ini dan ikut andil untuk berkomitmen di dalamnya. Hal ini dibutuhkan karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat pegawai yang tidak mengetahui program ini secara rinci sehingga mereka tidak ikut berkomitjen penuh di dalamnya, untuk itu perlunya sosialisasi ulang merupakan hal yang paling logis untuk dilakukan.
6. Pembuatan SOP yang sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi dengan SOP yang telah ada sebagai pedoman pelaksanaan program. Hal ini merujuk pada keadaan di lapangan dimana terdapat masalah yang tidak dapat diatasi sesuai dengan SOP yang berlaku, untuk itu perlunya pembuatan SOP yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. Pengantar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Kusnadi, dkk. 2005. Pendidikan Keaksaraan Filosofi, Strategi, Implementasi. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Milles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman dan Jhonny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook. Edisi Ketiga. Sage Publication
- Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- _____. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Internet:
- Hiryanto. *Efektivitas Program Pemberantasan Buta Aksara Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan (online), Volume 02, Nomor 1 (ejournal.uny.ac.id diakses tanggal 15 November 2017)